

**BENCANA ASAP DI INDONESIA:
Dampak dan Tantangan Koordinasi Antar Birokrasi dan Komunikasi Politik
Antar Negara Indonesia-Malaysia**

Oleh
Riani Bakri dan Abdul Rahman
armanhaji77@gmail.com
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstract:

This articulation tries to expose the crisis about the smoke disaster in Indonesia which can exacerbate political relations between the Indonesia-Malaysia countries. This is important because the government and the people of Indonesia are often trapped in various problems that are actually simple. However, due to political miscommunication between countries coupled with the lack of coordination between bureaucracies, the problem that is actually simple is actually growing and complex.

Keywords: *smoke disaster, coordination, political communication between Indonesia-Malaysia countries.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi fokus penanganan perubahan iklim di dunia. Fokus dari masyarakat dunia atas Indonesia adalah karena kepemilikan hutan yang sangat potensial sebagai sumber daya alam (SDA). Secara geopolitik Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak SDA strategis dimana hampir mayoritasnya tidak terbaharukan; namun hutan Indonesia yang sebenarnya terbaharukan mulai nampak sangat rentan akibat banyaknya pembalakan liar, pembakaran hutan, dan kejahatan hutan lainnya. Indonesia memiliki

perbatasan hutan dengan Malaysia di Kalimantan.

Seperti yang kita ketahui di media TV bahwa berbagai kalangan di Malaysia acapkali menggeser patok-patok perbatasan dan cukong-cukong Malaysia sering terlibat dalam aktivitas penebangan ilegal di Indonesia. Meskipun begitu, karena sudah terjalin kerjasama melawan kejahatan dengan baik dengan aparat sekitar, maka hal ini sulit diberantas. Meskipun demikian, Malaysia turut juga mendapat musibah akibat keterlibatannya (miskipun tidak secara langsung) dalam pembalakan liar,

yaitu musibah asap akibat kebakaran hutan.

Dengan seringnya pembalakan liar terjadi, masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia ingin mendapatkan “uang mudah”. Hal ini terjadi karna pemerintah yang tidak tegas menegakkan hukum menjadikan masyarakat dan perusahaan seolah-olah terinspirasi untuk merambah hutan. Regulasi dan penegakan hukum yang lemah menjadi faktor yang menyebabkan kebakaran hutan yang dilaksanakan sembarang.

Tahun 1997/1998 dan hingga tahun 2014/2015 Indonesia mengalami musibah kebakaran hutan yang disebabkan oleh pembukaan lahan untuk industri dan ekstensifikasi. Ditambah dengan fenomena alam elnino maka api yang biasanya mudah padam mejadi sulit untuk dipadamkan karna keadaan iklim yang kering dan terjadi kekeringan¹. Banyak Negara ASEAN lain di sekitar Indonesia (Malaysia, singapura, dan Brunai Darussalam) sangat khawatir bila terjadi asap dari kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera.

Indonesia sudah menjadi pemegang rekor kebakaran hutan terluas

sepanjang sejarah. Pada mulanya rekor ini dipegang Brazilia, di mana pada tahun 1963 sekitar 2 juta hektare hutan di Negara ini hangus terbakar. Rekor ini kemudian dipecahkan oleh Indonesia pada tahun 1982/1983 yaitu di Kalimantan Timur dimana sekitar 3,5 juta hektar hutan kita hangus merah di lalap sijago. Rekor ini kembali di pecahkan dengan angka yang lebih fantastis, dimana di beberapa wilayah Indonesia pada 1997/1998 api melalap 11,7 juta hektar hutan yang menghasilkan selimut tebal asap di Asia Tenggara². Angka ini pada tahun-tahun berikutnya menurun walaupun cenderung tidak terdokumentasi dengan baik. Namun, dominasi Indonesia tetap tak tertandingi. Citra Indonesia pun menjadi begitu buruk, antara tak mampu memadamkan kebakaran hutan secara tuntas.

Tidak lama ini musibah kabut asap akibat kebakaran hutan pun kembali terjadi di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat yang menyebabkan jarak pandang sangat minim, sehigga mengganggu aktivitas transportasi di Pekanbaru dan sekitarnya dan juga di Kalimantan Barat. Musibah ini tidak hanya menimpa Indonesia, melainkan

¹ Fenomena elnino sendiri biasanya mengalami siklus 2-7 tahun, dalam Teuku Rezasyah. *17 Bom*

Waktu Hubungan Indonesia-Malaysia, Humaniora, Bandung, 2011 hlm 68.

² *Idem*, hlm 67

juga merambat ke negeri tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Sehingga selain melalui organisasi ASEAN, negara-negara yang terkena dampak bencana tersebut melakukan hubungan kerjasama internasional dengan menyumbangkan tenaga dan dana bagi penanggulangan kebakaran hutan dan asap. Hubungan kerjasama internasional ini masih belum optimal karena setiap tahun mereka mengalami bencana yang sama dan menerima dampak dari bencana tersebut.

Atas dampak bencana asap yang setiap tahun terjadi di Sumatra dan Kalimantan, negara-negara tetangga juga menyampaikan kritikan pedas bagi Indonesia, baik melalui komunikasi politik secara resmi antar negara melalui surat resmi kenegaraan, melalui akun-akun resmi di media sosial, maupun dengan berunjuk rasa di depan Konsulat Jenderal Indonesia yang berada negara-negara yang terkena dampak kabut asap yang berasal dari Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain adalah wawancara, pengamatan, dan studi pustaka. Metode wawancara dilakukan

terhadap beberapa *stakeholder* dari berbagai instansi terkait seperti Gubernur, Kepala BPBD, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala BMKG, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala PMI, TNI-Polri, dan tokoh masyarakat lainnya yang diketahui mengetahui banyak tentang bencana kebakaran hutan dan bencana asap. Studi pustaka dilakukan terhadap sumber informasi tertulis dan laporan-laporan penelitian terdahulu yang berkaitan

KAJIAN TEORITIS

Hutan adalah paru-paru bumi. Bagaimana tidak, pepohonan yang tumbuh di dalamnya mampu menyedot emisi karbon di udara yang terakumulasi dari sisa-sisa metabolisme makhluk hidup, sisa-sisa pembakaran, asap pabrik dan kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Hasil studi Bank Dunia³ menyebutkan bahwa tingkat laju penurunan hutan (deforestasi) di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun sejak tahun 1996. Laju deforestasi yang begitu tinggi ini cukup mengejutkan generasi sekarang yang sadar akan kehidupan berkelanjutan. Penyebabnya banyak faktor salah satunya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi secara alami karena suhu yang

³ Anonim, "Melawan Monster Penghancur Sumberdaya Alam". Dalam: Tanah Air, Edisi April, 2002 Hal: 4-5, Jakarta

tinggi dari gelombang panas atau terjadi karena ulah manusia seperti yang sering terjadi di Indonesia dan beberapa wilayah dunia. Asap dari pohon-pohon yang terbakar dapat membentuk kabut asap tebal, seperti yang sempat dialami Indonesia hampir setiap tahun.

Kabut asap dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari polusi udara. Kabut Asap istilah adaptasi dari bahasa Inggris smog (*smoke and fog*), adalah kasus pencemaran udara berat yang bisa terjadi sehari-hari hingga hitungan bulan⁴. Kabut asap merupakan jenis polusi udara, yang pada awalnya dinamai campuran antara asap dan kabut di udara. *Cambridge Dictionary* mendefinisikan kabut asap sebagai campuran asap, gas, dan bahan kimia, terutama di kota-kota, yang menyebabkan kesulitan untuk bernafas dan berbahaya bagi kesehatan⁵. Kabut asap ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan merugikan bagi aktivitas transportasi baik udara, darat dan laut.

Bagi Indonesia kebakaran hutan telah mengakibatkan kerugian ekonomi dari degradasi dan deforestasi hutan di Indonesia berkisar antara 1,62 - 2,7 miliar dolar AS. Dan jumlah ini bisa lebih tinggi

jika dihitung hilangnya flasma nutfah dan keragaman hayati yang dimiliki hutan⁶.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ideologi Indonesia mengharuskan Negara menjamin keadaan hajat hidup orang banyak. Pembakaran hutan dan pencurian kayu akibat pembalakan liar adalah sebuah kontradiksi dari ideology Indonesia. Kehilangan sumberdaya yang produktif dan memiliki banyak fungsi penunjang bagi masyarakat banyak seharusnya ditanggapi lebih serius oleh pemerintah. Asap yang dihasilkan dari pembakaran memperlihatkan bahwa Indonesia tidak bisa menjadi bagian dari ketertiban dunia. Asap merugikan tidak hanya Indonesia saja tetapi negara-negara tetangga juga.

Asap akibat kebakaran hutan menghambat kepemimpinan politik pemerintahan daerah yang terkena asap tersebut. Banyak wilayah seperti Kalimantan dan Sumatera diliputi asap tebal dan membut urusan pemerintahan terhambat. Pelayanan publik yang menjadi kewajiban politik pimpinan daerah tersendat. Pembukaan lahan dengan cara membakar sembarangan

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Asbut>. Diakses tanggal 18/12/2018 pkl 3:00 Am

⁵ <https://doseogeografi.com/pengertian-kabut-asap/> Diakses tanggal 18/12/2018 pkl 3:11 AM

⁶ <http://209.85.175.104/search?q=cacheeakkdgsi+dampak+strategis+sector+pemerintah+akibat+asap+kebakaran+hutan&hl>. Diakses tanggal 13 Maret 2018 pkl. 16.00

baik yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan industri memperlihatkan bahwa kemampuan politik daerah untuk mengawasi sumber daya alamnya sangatlah lemah.

Pemerintahan yang bersih mempunyai beberapa aspek, yaitu: pertama, prinsip koordinasi formal maupun informal. Koordinasi formal dalam *good governance* diterapkan melalui pemerintahan berdasarkan hukum. Kedua, mengacu kepada para pelaku pemerintahan, yaitu pemerintah dan kelompok masyarakat. Komponen pemerintahan yang bersih biasanya meliputi: pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi dalam pembuatan kebijakan, pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab, birokrasi yang memenuhi syarat masyarakat warga yang memiliki kemampuan (*capable*). Masyarakat di Kalimantan dan Sumatera sangatlah melihat hutan ini menjadi presiden politik yang buruk bagi pemerintah daerah (Pemda). Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan Pemda dalam memantau pembukaan hutan terutama oleh kalangan industri. Akibat beberapa pihak, semua masyarakat lokal menanggung akibatnya.

Di tingkat pusat, alasan *elnino* menjadi penyebab kebakaran hutan yang meluas dan menimbulkan asap, jangan

dijadikan apologi tanpa tindakan. Pemerintah selama ini memiliki keinginan politik yang kuat dalam menangani masalah, namun, pemerintah belum siap dengan upaya mitigasi. Penanganan masalah yang terlambat, relatif sulit diatasi dan pemerintah akan dinilai negatif oleh negara tetangganya. Hal ini memberikan ketidakpercayaan negara Malaysia terhadap Indonesia dan akan membuktikan bahwa Indonesia tidak kompeten dibanding Malaysia dalam menjaga hutannya.

Dari sisi ekonomi, Indonesia kehilangan banyak potensi alamnya akibat kebakaran hutan. Pembukaan lahan yang tidak terencana membuat banyak hutan Indonesia sebagai potensi ekonomi hilang begitu saja. Selanjutnya, kerugian potensi wisata dari hutan Sumatera dan Kalimantan juga surut akibat hilangnya hutan akibat kebakaran. Potensi kehilangan Indonesia meningkat ketika mayoritas Pulau Sumatera dan Kalimantan juga terkena asap sehingga melambatkan kegiatan perekonomian di dua pulau ini. Banyak kegiatan prokonomian di bidang riil di dua pulau tersebut sangat terganggu dengan asap tebal yang berasal dari pembakaran hutan.

Selain berdampak bagi Indonesia, negara tetangga Indonesia juga

mendapat-kan musibah yang sama akibat angin yang bertiup ke utara. Malaysia, Sngapura, Brunei Darussalam, dan Tahailan. adalah Negara yang menderita akibat asap tebal dari kebakaran hutan. Malaysia dan Singapura sangat mengeluhkan akibat buruknya kualitas udara yang disebabkan oleh gangguan asap. Hal ini mempengaruhi segala aspek di dua Negara tersebut, yang merupakan surga penyelundupan kayu dari Indonesia. Pada saat asap mengepul, Malaysia dan Singapura megelami banyak kerugian terutama di sektor pariwisata.

Dari sisi sosial budaya, dampak kabut asap ini sangat banyak diderita oleh masyarakat di empat negara terutama Indonesia. Rasa prustasi dari masyarakat menimbulkan dampak yang tidak bisa dihilangkan atau dilupakan begitu saja. Dalam masalah ini, pemerintah dianggap melupakan *human security* dari masyarakat sekitar daerah tempat terjadinya kebakaran hutan sehingga menimbulkan kabut asap. Ancaman kecelakaan, kesehatan, kelaparan, dan tindakan kriminal mengganggu pikiran masyarakat. Intensitas hubungan sosial di daerah-daerah yang menjadi korban tentu akan menurun.

Penyebab kebakaran hutan 2014 lalu diperkirakan serupa dengan kasus kebakaran tahun 1998. Pembakaran dan pembukaan lahan dengan cara dibakar banyak dilakukan dengan sengaja oleh lusinan industry kayu. Hal ini dilakukan agar proses perambahan dilakukan dengan biaya paling murah dan cepat. Tentunya cara seperti ini bukan budaya semua masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pembakaran hutan. Budaya masyarkat di suku pendalaman yang bergantung dengan hutan juga terancam.

Hutan Indonesia sendiri meskipun hanya mencankup 1,3 % hutan di dunia tetap hutan Indonesi mengandung diversitas yang tinggi. Hutan Indonesia meng-gandung 10% dari total keragaman bunga di dunia, 12% dari mamalia di dunia, 17% reptil dan binatang amphibi, dan 17% dari special burung dunia⁷. Tidak heran media dunia menyorot kasus ini pada tahun 1998, 2006, 2010 dan 2014.

Menurut kalangan realis dalam hubungan internasional, Negara yang memiliki lokasi dan SDA yang strategis adalah negara yang dikaruniai banyaknya pilihan dalam hubungan internasional. Kehilangan SDA yang penting seperti hutan, akan membuat ketahanan sebuah

⁷ Teuku Rezasyah. "17 Bom Waktu...", Humaniora, Bandung, 2011 hlm 75

Negara (dalam kasus ini Indonesia) menjadi lemah. Dalam geostrategi, hutan memiliki fungsi yang sama dengan bukit dan penguungan; sebagai pertahanan alami (*natural defense*). Hambatan utama jika musuh menyerang Indonesia adalah hutan. Hal ini pernah dipraktikkan dengan baik oleh Vietnam pada saat perang melawan Amerika Serikat pada tahun 1959-1973. Amerika Serikat yang superior secara teknologi tidak mampu menang atas Vietkong yang bersembunyi di hutan-hutan.

Dari sisi perspektif baru keamanan nasional, kebakaran hutan dan asap tebal meningkatkan *human insecurity* di Indonesia terutama wilayah terjadi kabut asap. Masyarakat sangat tidak tenang jika udara yang mereka hirup adalah polutan. Hilangnya hutan berarti hilangnya daerah serapan air sehingga menimbulkan ketakutan bencana pada musim hujan. Sulitnya air bersih untuk dikonsumsi akan menimbulkan kekhawatiran lanjutan. Munculnya kekhawatiran kesulitan pangan akibat terbakarnya hutan serta lambatnya perses pertanian juga akan mengancam masyarakat. Dengan jarak pandang terbatas, distribusi bahan pangan akan mengalami hambatan. Keamanan akan kesehatan juga menjadi kekhawatiran lanjutan akibat sesak nafas

dan penyakit yang disebabkan oleh asap kebakaran hutan.

Dampak utama kebakaran hutan dan lahan gambut adalah asap yang mempengaruhi jarak pandang dan kualitas udara. Asap bertahan cukup lama pada lapisan atmosfer permukaan karena akibat rendahnya kecepatan angin permukaan. Lapisan asap ini berdampak serius pada sistem transportasi udara, dan pada kesehatan manusia serta flora dan fauna.

Permasalahan asap akibat kebakaran hutan inilah kembali sangatlah bertentangan bila dilihat dalam tataran ideologi Negara kita. Penyebab timbulnya asap adalah kebakaran hutan. Di tanah air, hutan alam ini terbakar oleh beberapa faktor penyebab, yakni oleh ulah manusia dan faktor alam itu sendiri. Sudah banyak diketahui bahwa penyebab utama kebakaran hutan adalah kegiatan manusia, diantaranya sistem perlandangan tradisional dari penduduk setempat yang berpindah-pindah, yang menggunakan metode pembakaran untuk membuka lahan. Namun, pembukaan lahan untuk perlandangan berpindah tersebut umumnya relatif terbatas dan lebih terkendali, karna para petani juga mengerti akan arti penting hutan dan mereka telah mengikuti aturan pembakaran hutan secara turun-menurun.

Penyebab lain adalah ulah para orang yang iseng dengan sengaja membakar suatu lahan dan kemudian merambat ke mana-mana. Di musim kemarau panjang, keadaan hutan memang serba kering, dedaunan yang jatuh di tanah sudah sangat kering dan layaknya seperti bahan bakar saja. Kondisi ini membuka kesempatan terjadinya kebakaran dahsyat walau diawali dari sebuah puting rokok yang masih menyala. Kondisi kering diperburuk lagi dengan adanya hembusan angin yang relatif kencang. Secara alamiah, kebakaran hutan dapat pula terjadi karna efek akumulasi panas cahaya matahari di bumi namun hal ini sangat jarang terjadi di Indonesia.

Yang menarik dipertanyakan adalah, apakah Indonesia sudah melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dan berwawasan ekologi sebagai mana tercantum dalam *forest principles*, yang ditetapkan oleh *earth summit* di Rio DE Janeiro tahun 1992? Kalau kita cermati, pelaksanaan di Indonesia seperti “jauh panggang dari api”. Memang betul pengelolaan

pemafaatan sumber daya hutan dan lahan secara berkelanjutan dan berwawasan ekologi telah diatur secara tegas baik oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 maupun oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, tetapi dalam peraktiknya masih dalam pengelolaan pemanfaatan secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi⁸. UU pokok kehutanan No. 5/1967, UU Pokok Pertambangan No 11/1967, PP No 21/197 (UU No. 41/1999), dimana tidak ditemukan semuah pasal pun yang secara jelas melarang orang untuk melakukan pembakaran. Pasal 50 ayat 3 huruf d, misalnya, secara jelas, membuka peluang dihidupkannya kembali pembukaan lahan dengan cara bakar karna larangan membakar hutan dapat dikecualikan dengan tujuan- tujuan khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang⁹.

Pembakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bentuk kejahatan kehutanan yang sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan cukup besar mencangkup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati,

⁸ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/040901/sorotan/1242604.htm-paragrafh.10-11>. (dalam tanggal 11 Agustus 2014. Diakses tanggal 13 Maret 2018 Pkl 14.13

⁹ <http://209.85.175.104/search/q=cachesGE.per>

masalah+hubungan+Indonesia+vs+Malaysia+ppt+asap+akibat+kebakaran+hutan+Indonesia+Malaysia=hubungan. Diakses tanggal 13 Maret 2018 pkl 14.50.

merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, udara, dan laut. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia juga menyebabkan buruknya hubungan politik antar Negara terutama Negara yang berdekatan seperti Malaysia dan Singapura.

Akibat kebakaran hutan tentunya berdampak pada lingkungan maupun sosial masyarakat. Dampak lingkungan diakibatkan oleh timbulnya asap kebakaran yang cukup mengganggu kesehatan, hilangnya keanekaragaman hayati terutama tumbuhan bawah dan biota tanah, hilang/rusaknya habitat serta sumber makanan bagi satwa liar. Selain itu, kebakaran hutan kadang merusak keberadaan situs-situs ekologi maupun budaya di sekitar kawasan tersebut.

Rusaknya situs budaya mengakibatkan fungsi dari situs tersebut menjadi berkurang. Kerusakan nyata dirasakan masyarakat terutama jika wilayah situs tersebut melindungi mata air yang dimanfaatkan masyarakat. Rusaknya pepohonan dan tumbuhan bawah yang berfungsi dalam konservasi tanah dan air menyebabkan berurangnya

debit air pada mata air yang juga sebagian merupakan situs ekologi dan budaya.

Secara sosial dan ekonomi masyarakat, efek dari kebakaran hutan sangat berpengaruh bagi ketersediaan pakan ternak. Pakan ternak yang diambil dari tumbuhan bawah hutan (hijauan makanan ternak) berupa rumput dan berbagai jenis semak/perdu lain akan musnah jika terjadi kebakaran hutan. Padahal pada saat musim kemarau keberadaan pakan ternak sangat terbatas karena kering, dengan demikian masyarakat akan semakin kesulitan untuk mendapatkan makanan ternak di sekitar tempat tinggalnya.

Selain itu, polusi asap juga menimbulkan biaya ekonomi tinggi yang dapat dirasakan segera setelah polusi terjadi, yakni dalam bentuk absen kerja dan kegiatan bisnis terhambat, kegiatan pariwisata yang menurun, penundaan pesawat dan kecelakaan, belum lagi langkah-langkah darurat pemadam kebakaran yang berbiaya tinggi. Bangsal-bangsal rumah sakit dipenuhi para korban gangguan saluran pernapasan akut.

Pada kebakaran tahun 1997 berkurangnya jarak pandang di beberapa kota di Kalimantan dan Sumatera antara bulan Mei dan Oktober telah mengakibatkan penundaan jam terbang

dan bahkan ada penutupan beberapa Bandar udara. Di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera terutama di daerah-daerah yang banyak dijumpai kebakaran hutan dan lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan gambut juga berdampak atas hilangnya beberapa potensi ekonomi terutama di sektor kehutanan dan pertanian. Kerugian ekonomi pada sektor kehutanan kebakaran hutan tahun 1997 mencapai Rp 2,4 trilyun untuk delapan Provinsi kawasan bergambut di Kalimantan dan Sumatera. Sedangkan di sektor pertanian kerugiannya mencapai Rp 718 milyar.

Akibat tidak langsung dari kebakaran lahan gambut merupakan akibat lanjutan (*post effect*) yang dihasilkan ketika perses pemulihan hutan dan lahan gambut baik secara alamiah maupun buatan manusia belum mencapai titik pulih. Akibat ini bisa terjadi selama bertahun-tahun tergantung kemampuan untuk memulihkan. Akibat utamanya adalah terganggunya fungsi hidrologis dan pengaturan iklim. Hilangnya vegetasi dan terbukanya hutan dan lahan gambut menyebabkan debit aliran permukaan dan erosi akan meningkat dalam musim hujan sehingga dapat menyebabkan banjir. Selain itu, hilangnya vegetasi akan mengurangi penyerapan CO₂ sehingga meningkatkan

efek rumah kaca dan hutan juga hilangnya fungsi pengaturan iklim.

Menurut peneliti yang dilakukan oleh beberapa peneliti, terlihat bagaimana besarnya dampak dari kabut asap yang mengancam aktivitas ekonomi individu, masyarakat dan perusahaan-perusahaan di Malaysia dan Singapura. Terbatasnya jarak pandang, mengakibatkan aktivitas perekonomian di kawasan pelabuhan dan bandar udara di Malaysia, Indonesia dan Singapura terganggu dan pada situasi tertentu tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan *ASEAN secretariat's environment and disaster management centre*, kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997-1998 diperkirakan 9 milyar dolar AS. Di sisi lain, kabut asap mengakibatkan banyaknya para investor asing takut untuk berinvestasi di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Karna dengan adanya kabut asap mengakibatkan banyaknya biaya dan resiko yang harus mereka tanggung.

Bagi Indonesia kebakaran hutan telah mengakibatkan kerugian ekonomi dari degradasi dan deforestasi hutan di Indonesia berkisar antara 1,62 - 2,7 miliar dolar AS. Dan jumlah ini bisa lebih tinggi

jika dihitung hilangnya flasma nutfah dan keragaman hayati yang dimiliki hutan¹⁰.

Dilihat dari perspektif pertahanan dan keamanan, Indonesia merupakan Negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, karena secara geografis Indonesia dengan Malaysia sangat berdekatan. Namun pada akhir-akhir ini muncul berbagai permasalahan antara Indonesia-Malaysia yang mengganggu hubungan kedua Negara, baik di bidang militer maupun non-militer, dan permasalahan tersebut berdampak pada pertahanan keamanan dua Negara karena letaknya berdekatnya. Permasalahan yang bersipat *transboundary* dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan pertahanan Indonesia dan harus segera diantisipasi dan di atasi dan agar tidak merusak hubungan dan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik¹¹.

Dampak Strategis di Sektor Pemerintahan dan Masyarakat

Kejadian ini menunjukkan bahwa seolah-olah pemerintah tidak kapabel

dalam melindungi masyarakat lewat regulasi dan penegakkan hukum. Kelalaian pemerintah seringkali disebabkan oleh mudahnya persetujuan konservasi hutan lewat jalur suap. Karenanya pengawasan dilakukan dengan tidak professional dari para pembuka lahan untuk kepentingan industry bebas mengambil cara paling mudah yaitu dengan membakar hutan¹².

Miski fenomena *elnino* mempengaruhi kekeringan sehingga hutan menjadi mudah terbakar, tetap saja pemerintahan Indonesia akan dinilai negatif. Birokrasi yang korup dan undang-undang yang tidak jelas membuat Negara kita berada di jajaran bawah PMA. Dengan melihat mudahnya birokrasi Indonesia disogok, maka kebakaran hutan secara langsung akan mengarah pada pemerintah yang melakukannya. Pemerintah juga pernah melakukan manipulasi data akan luasnya jumlah hutan yang terbakar pada tahun 1999¹³.

Ketidaksiapan pemerintah dengan mitigasi bencana kebakaran

¹⁰

<http://209.85.175.104/search?q=cacheeakkkdq+ssi+dampak+strategis+sector+pemerintah+akiba+asap+kebakaran+hutan&hl>. Diakses tanggal 13 Maret 2018 pkl. 16.00

¹¹ Menjaga hubungan baik antar Negara tetangga (Indonesia-Malaysia). Makalah disusun oleh Muhamad Bagus Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

¹²....*Milenium Development Goals* 2008. 2008, United State United Nation, hal 38. Diakses tanggal 13 Maret 2018 pkl. 16.25.

¹³ Pemerintah disinyalir manipulasi luas hutan yang terbakar "Suara Pembaharuan, 10 Agustus 1999 dari buku *trial by fire ...* Diakses tanggal 14 Maret 2018 pkl. 18.00.

hutan, bila bencana datang fokus pemerintah akan terbagi dan terbebani dengan masalah-masalah yang seharusnya bisa dihindari seperti banjir dan longsor. Pemerintah daerah akan semakin lambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karna sibuk mengurus bencana. Di Indonesia, mitigasi belum menjadi budaya pemerintah.

Di sektor masyarakat, hilangnya fungsi hutan bagi masyarakat adalah kerugian yang signifikan, apalagi jika disebabkan oleh perusahaan yang mendapatkan izin usaha oleh pemerintah. Selama bertahun-tahun banyak masyarakat yang kesal dengan mudahnya pemerintah memberikan izin usaha kepada pengusaha perkebunan dan pertambangan. Pembukaan lahan dan penyerobotan lahan warga sering menjadi masalah antar masyarakat dan pemerintah. Karna kesal akibat banyak warga melakukan sendiri pembakaran hutan dengan cara tradisional yang ternyata menimbulkan masalah bagi lebih banyak masyarakat sekitar wilayah pembakaran, yaitu asap bagi masyarakat.

Rekreasi dan edukasi adalah sebuah hal yang penting terutama bagi

generasi muda yang bisa belajar akan kekayaan alam, baik flora maupun fauna di Indonesia. Lebih dari 24% rekreasi dan edukasi, konservasi biodiversitas, dan perlindungan tanah dan air memiliki dampak langsung pada masyarakat. Jika tidak ada hutan maka spesies flora dan fauna hanya akan bisa dinikmati lewat televisi atau gambar di masa depan.

Di dalam negeri, kabut asap yang melanda Provinsi Riau mulai mengganggu jadwal penerbangan dari dan ke Bandar Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. beberapa penerbangan terpaksa di tunda untuk lepas landas dan mendarat akibat pendeknya jarak pandang sehingga membahayakan penerbangan¹⁴. Dengan demikian aktivitas masyarakat setempat terganggu, dan bisa dibayangkan kerugian negara akibat asap tersebut.

Asap yang dihasilkan akibat kebakaran hutan juga telah mengakibatkan gangguan kesehatan terutama masyarakat miskin, lanjut usia, ibu hamil dan anak belita. Selama kasus selama bulan September-November 1997 di Delapan Provinsi di Kalimantan dan Sumatera tercatat 527 kematian, 298,125

¹⁴ <http://kompas.com> Kabut Asap Tunda Jadwal Penerbangan, Kompas tanggal 8 Agustus 2008. Hlm 23.

asma, 58.095 bronkitis, dan 1.446.120 ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), termasuk di Kalimantan Selatan yang di Jumpai 69 kasus kematian, 41.800 asma, 8.145 bronkitis, dan 202.761 kasus ISPA¹⁵.

Tantangan Komunikasi Politik Antar Negara

Komunikasi, bagian yang paling penting dari semua sistem sosial di dalam masyarakat manusia, termasuk juga adalah politik. Myers & Myers (1982) mengemukakan pendapatnya tentang komunikasi sebagai titik pusat kekuatan menyatukan sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan karenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir¹⁶. Dalam komunikasi politik fakta-fakta sosial selalu dihubungkan dengan peristiwa dan waktu dimana fakta sosial itu terjadi. “Komunikasi politik memungkinkan elite politik menyediakan ruang publik untuk berkomunikasi dan saling menjajaki peluang-peluang yang memungkinkan mereka bertemu dan

membicarakan masalah-masalah penting yang sedang dihadapi serta memungkinkan mereka bersepakat melakukan hal-hal yang strategis di waktu ini dan akan datang”¹⁷. Komunikasi politik merupakan upaya membangun sesepahaman yang bisa menjadi landasan kesepakatan bersama di masa mendatang.

Erlina Hasan menjelaskan fungsi pemerintah terkait mengenai “komunikasi pemerintahan memiliki peran ganda, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat tercapainya berbagai program dan tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, komunikasi dinyatakan juga sebagai juru kunci berakhirnya konflik dan pertikaian di antara pemerintah, maupun masyarakat secara makro (dalam tulisan ini negara), sebagai landasan pembentukan kelompok yang solid”¹⁸. Dengan demikian komunikasi yang terjalin dengan baik, tentu tidak akan menimbulkan konflik, protes, unjuk rasa, karena dengan komunikasi dapat saling

¹⁵

<http://209.85.175.104/search.multiply.com/journal/item/20+pengaruh+social+budaya+akibat+asap+kebakaran+hutanshl>. Diakses tanggal 14 Maret 2018, pkl 16.40.

¹⁶ Myers & Myers dalam Erlina Hasan “Komunikasi Pemerintahan” PT Refika Aditama Bandung, 2010 hlm 18.

¹⁷ Burhan Bungin, “Komunikasi Politik Pencitraan The Social Construction of Public Administration

(SCoPA). Kontruksi Sosial Atas Citra Pemimpin Publik dan Kebijakan-Kebijakan Negara dalam Perspektif Postmodern Public Comunication and new Public Administration. Prenadamedia Group Jakarta, 2018 hlm 175.

¹⁸ Hasan, Erlina, “Materi pokok Komunikasi Pemerintahan” Universitas Terbuka Jakarta, 2014 hlm 2.14.

memahami persoalan yang dihadapi masing-masing individu maupun kelompok serta masyarakat secara lebih luas.

Pada sektor pemerintahan kita dapat melihat jika puluhan orang berunjuk rasa di depan kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia, Selasa (11/10). Mereka mengungkapkan kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia yang belum mampu menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan kabut asap di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang menyebabkan Negara-negara tetangga Indonesia termasuk Malaysia terkena dampaknya. Para pengunjuk rasa menggunakan masker sebagai simbol bahaya kabut asap telah mengancam kesehatan mereka. Dalam beberapa minggu terakhir, sebagai Negara Asia Tenggara terkena dampak akibat kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia.

Menteri Kesehatan Malaysia meminta pemerintah Indonesia segera mengatasi kabut asap dan kebakaran hutan, karena bencana tersebut tidak hanya mengganggu kesehatan tetapi juga berdampak kepada Faktor ekonomi Malaysia. Pihak Kedubes Indonesia mengatakan mereka memberikan

perhatian kepada warga Malaysia bahwa Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan kabut asap. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga pernah menyatakan, saat ini pemerintah hanya bisa mengharapkan musim hujan datang lebih cepat agar kabut asap dan kebakaran hutan segera teratasi.

Kabut asap kiriman dari Indonesia menimbulkan kegeramaan negara-negara tetangga. Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong bahkan telah menulis surat resmi untuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang kekecewaan Negeri Singa itu. Isi surat tentang kekecewaan Singapura atas kabut asap akibat pembakaran hutan di Indonesia yang telah menyelimuti beberapa bagian Asia Tenggara. Dalam suratnya, PM Lee menyatakan bahwa “Indonesia perlu menangani masalah secara efektif dan tepat pada waktunya sehingga kepercayaan investor di Indonesia, kedudukan Indonesia di internasional dan kredibilitas ASEAN tidak akan terpengaruh. meskipun tahun ini sudah terlambat untuk mencegah kebakaran¹⁹”.

Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirayuda mengatakan, “Indonesia memahami keluhan negara-negara

¹⁹ <http://Harian The Star.Com>. Diakses tanggal 14 Maret 2018 pkl 18.10

tetangga karna asap dari pulau-pulau di Indonesia dan berusaha mengadakan upaya mengatasi bersama dengan lima Negara ASEAN. Oleh karna itu, kita mengadakan upaya bersama dengan lima Negara ASEAN yang terkena asap, kita adakan pertemuan. Itu penting dilakukan sebagai reaksi positif Indonesia atas masalah asap tersebut''²⁰.

Presiden SBY menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah dan rakyat Singapura dan Malaysia karena asap Indonesia telah mengganggu mereka. ''Saya patut meminta maaf atas kejadian ini meskipun jelas kebakaran hutan tersebut bukan karna kesengajaan Indonesia''. Beberapa hari terakhir, sejumlah pihak Malaysia mengungkapkan kekesalan mereka atas dampak asap yang berasal dari Indonesia yang tidak hanya telah mengganggu kesehatan, tapi juga mengganggu dalam sektor ekonomi warga Negara Jiran Malaysia²¹. Hal ini sungguh sangat berdampak buruk bagi hubungan pemerintahan Indonesia dengan Malaysia karena adanya asap yang diakibatkan atas kebakaran hutan.

Tantangan Koordinasi Negara-Negara ASEAN

Di tingkat Intrabirokrasi, kementerian kehutanan (Kemhut) memegang peranan penting dalam masalah ini. Koordinasi di titik-titik api (*hotspot*) merupakan hal yang sangat krusial. Pembalakan hutan dan pembukaan lahan dengan cara yang salah juga harus di waspandai. Kebijakan Kemhut pusat harus mampu disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan dan petugas terkait. Pemberian insentif kepada masyarakat sekitar hutan akan meringankan tugas Kemhut dalam menjaga hutan di Indonesia. Undang-undang mengenai konservasi hutan harus dilaksanakan. Kemhut juga harus membantu penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian.

Sementara itu, Pemerintah daerah dikenal sebagai salah satu penghalang upaya penegak hukum atas kejahatan hutan yang terjadi di daerah lokal. Dengan birokrasinya yang sangat rumit dan tidak akuntabel membuat tata kelola pemerintah yang baik sangat sulit dijalankan di sana. Hal ini semakin mempersulit mitigasi bencana akibat pembukaan lahan, penebangan dan

²⁰ *Idem*. Diakses tanggal 14 Maret 2018 pkl 18.15

²¹

<http://indonesiancommunity.multiply.com/note>

[/item/323](#). Diakses tanggal 14 Maret 2018 pkl 18.20

pembakaran hutan. Padahal tugas dasar adanya pemerintah menurut Hasan adalah “untuk menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktivitas kehidupannya secara wajar”²²

Satu institusi yang tidak kalah pentingnya adalah polisi. Seringkali polisi melakukan aksi penebangan tebang pilih. Di pusat sendiri, dengan kurangnya dana polisi hanya menuntas 700 kasus dari 1700 yang dilaporkan masyarakat²³. Belum lagi perkara atai SP3 kepada cukong yang berhasil ditangkap kepolda sebelum karna di tangkap kurang bukti. Polisi harus mulai sigap dan serius dalam masalah *illegal logging* dan pembakaran hutan. Jika kebakaran hutan terjadi akibat pembukaan lahan dan menimbulkan asap maka pemerintah pusat, pemadam kebakaran, dan badan meteorologi yang terlibat. Meskipun begitu, badan meteorologi. Phenomena *el nino* terjadi dalam rentang 2-7 tahun setelah tahun 2006. Sudah saatnya diwaspadai.

Sementara itu tingkat antar birokrasi, kementean kehutanan (Kemhut) harus membereskan jajaran yang terlibat kasus korupsi pada fungsi hutan. Penegakan hukum pada lembaga legaslatif sangatlah sulit untuk

diharapkan. Tertangkapnya anggota DPR yang menjadi tersangka korupsi hutan memperlihatkan bahwa masih adanya kejahatan dalam kasus hutan ini begitu sulit untuk diberantas pada jajaan DPR. Setelah itu Kemenhut berkerjasama dengan polisi untuk membuat lembaga khusus untuk mengenai masalah ini. Pemda juga harus diperiksa dalam masalah ini. Banyaknya peraturan daerah yang mempermudah izin usaha harus ditinjau ulang.

Jika kebakaran sudah terjadi, dan asap menyebar keseluruh Indonesia, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: pemerintah pusat berkoordinasi dengan badan meteorology untuk meneliti kemungkinan untuk dapat membuat hujan buatan. Selain itu pemerintah pusat berkoordinasi dengan Pemadam kebakaran setempat dan TNI untuk memadamkan api dengan sumberdaya setempat. pemerintah pusat harus berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan untuk menangkal dan mereduksi akibat dari kabut asap sebesar mungkin bagi kesehatan masyarakat sekitar.

Dengan efek yang sangat massif bagi seluruh aspek kehidupan di

²² Erliana Hasan “Komunikasi Pemerintahan” Pt Rafika Aditama Bandung, 2010. Hlm 3

²³

<http://www.detiknews.com/read/2008/13/171>

[20/988073/10/minim-dana-polda-metrojaya-tebang-pilih-kasus](http://www.detiknews.com/read/2018/03/15/171/20/988073/10/minim-dana-polda-metrojaya-tebang-pilih-kasus). Diakses tanggal 15 Maret 2018 pkl.12.02.

Sumatera dan Kalimantan, sudah saatnya pemerintah pusat mencanangkan gerakan mitigasi bencana berupa kebakaran hutan di beberapa wilayah yang dianggap rawan di Sumatra dan Kalimantan sama halnya dengan proses evakuasi dan mitigasi tsunami, mitigasi asap akibat kebakaran hutan tidak kalah penting.

Pada tingkat koordinasi antara elit dan massa, perilaku elit sebenarnya sangat menyedihkan terutama dalam hal mitigasi bencana asap. Belum lagi tertang-kapnya beberapa anggota legeslatif yang berkaitan dengan Undang-Undang izin usaha yang menggunakan hutan. Elit pemerintah harus mengkomunikasikan kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan untuk perluasan lahan. Selain itu, izin usaha yang menjadi tersangka pembakaran hutan dihentikan. Massa sudah banyak kecewa dengan pemerintah pusat.

Pada tingkat intrabirokrasi, pemerintah Indonesia sepenuhnya sadar dengan masalah yang mereka timbulkan atas ASEAN, terlebih bagi Malaysia dan Singapura. Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar mengatakan bahwa negara-negara ASEAN harus bekerjasama untuk mengatasi keadaan

yang selalu berulang ini. mereka ingin negara-negara ASEAN bisa merumuskan rencana aksi dari pada hanya sekedar menandatangani kesepakatan yang hasilnya tidak seberapa, karena sama-sama terkena dampak dari serbuan asap. Kata Syed Hamid “mari kita mencoba mengatasi bersama dalam bentuk aksi nyata agar usaha yang dilakukan Indonesia untuk memadamkan api berjalan cepat dan lancar²⁴”.

Presiden Indonesia juga mengungkapkan akan menyewa pesawat Rusia untuk memadamkan api di daerah-daerah yang tingkat asapnya sangat tinggi. Sementara itu para menteri lingkungan hidup dari lima negara anggota ASEAN yang udaranya dipenuhi kabut asap mengadakan pertemuan di Singapura. Dalam pembicaraan itu dibahas langkah-langkah untuk memerangi kabut asap yang disebabkan oleh pembakaran hutan. Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura, Yaacob Ibrahim telah mengundang rekan-rekan sejawatnya dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand untuk membicarakan masalah asap. Pertemuan itu untuk membahas langkah-langkah segera dan jangka panjang yang harus

24

<http://indonesiancommunity.multiply.com/note>

[/team/323](http://team/323). Diakses tanggal 15 Maret 2018, pkl 14.50

diambil negara-negara untuk mengatasi masalah asap regional, kata pemerintah Singapura yang dilansir harian The Star. Beberapa pecan terakhir, kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Indonesia. Begitu pula dengan negara-negara tetangga Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailan²⁵.

Pada tingkat elit-massa, secara tidak langsung, kabut asap yang terjadi mempengaruhi hubungan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Hubungan yang terjadi akibat kabut asap bisa saja menghasilkan sebuah bentuk kerjasama dan bahkan terjadinya perselisihan di antara negara-negara yang menderita akibat kabut asap. Kabut asap yang melanda Malaysia dan kawasan Asia Tenggara lainnya telah mengakibatkan meningkatnya konstilasi politik di kawasan tersebut. Partai Oposisi terbesar di Malaysia, Partai Tindakan Demokratis (DAP) ber-demontrasi di luar Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Mereka mengatakan kabut asap merupakan ancaman bagi ekonomi dan kesehatan jutaan warga Malaysia. Mereka mendesak ASEAN supaya mengambil tindakan atas masalah itu.

²⁵ *idem*. Diakses tanggal 15 Maret 2018, pkl 14.55

²⁶

<http://209.85.175.104/search?q=cecheeakkdssi>

Tindakan yang dilakukan oleh Partai oposisi Malaysia di atas secara tidak langsung mengartikulasikan bagaimana pendapat dan persepsi dari sebagian masyarakat Malaysia terhadap kabut asap yang terjadi. Pemerintah Malaysia mendesak Indonesia untuk segera mengatasi kebakaran hutan agar Malaysia tidak menerima dampak dari kabut asap. Untuk menyelesaikan masalah ini, Pemerintah Malaysia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengambil pendekatan konfrontatif terhadap Pemerintah Indonesia karena ada kebutuhan yang lebih luas untuk memelihara hubungan mereka²⁶.

Komunikasi Politik Dalam Pengelolaan Pebatasan

Perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua Negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan adalah sebuah Negara atau *state border* dibentuk dengan lahirnya Negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya Negara mereka terpisahkan dan dengan adanya

[+dampak+strategis+sektor+pemerintah+akibat+asap+kebakaran+hutan&hl=id](#). Diakses tanggal 15 Maret 2018, pkl.14.00

tuntutan Negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.²⁷

Pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu *Boundaries* dan *frontier* kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah Negara. Perbatasan disebut *frontier* karena posisinya yang terletak di depan front dari suatu Negara, sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, dalam hal ini adalah Negara²⁸.

Perbatasan (*borders*) dipahami sebagai suatu garis yang dibentuk oleh alam atau unsur buatan manusia yang memisahkan antara wilayah suatu negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah negara lain.

Secara konseptual pengelolaan perbatasan negara memiliki tiga domain pokok yaitu *pertama* menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan negara, *kedua* untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa serta *ketiga* mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah

negara serta kawasan perbatasan termasuk pengawasan batas negara.

KESIMPULAN

Indonesia memiliki perbatasan hutan dengan negara Malaysia, seringkali terjadi permasalahan batas wilayah karena pergeseran patok-patok batas, dan juga karena kejahatan hutan yang dilakukan antara kedua negara Indonesia-Malaysia. Kejahatan hutan yang terbesar adalah terjadinya ilegaloging dan pembukaan lahan untuk kepentingan industry perkebunan, dengan cara membakar hutan. Akibatnya terjadilah bencana kebakaran hutan dan asap di Indonesia yang sangat berdampak strategis bagi negara-negara di Asia Tenggara, terutama negara-negara yang berdekatan seperti Malaysia dan Singapura.

Entah pura-pura tidak tahu keterlibatan antar negara atas bencana ini, Malaysia dan Singapura turut melakukan protes keras kepada Indonesia, baik melalui surat resmi maupun dengan cara berunjuk rasa di depan Konsulat Jenderal Indonesia, menyuarakan kekecewaannya atas Indonesia. Citra Indonesia pun begitu

²⁷ Rizal Dharmaputra, "Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan" IDSPS Jakarta 2009 hlm 3

²⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, "Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional" Graha Ilmu Jakarta, 2011 hlm 63.

buruk karena tidak mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik antar negara dalam penanganan asap secara tuntas.

Atas ketidakmampuan dan miskomunikasi antarnegara tersebut menyebabkan gangguan hubungan politik antar negara Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai akibat dari bencana kebakaran hutan dan asap. Dampak dari asap tersebut, menimbulkan kerugian yang begitu besar bagi negara-negara yang terkena dampak asap dari sisi ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan stabilitas negara-negara ASEAN.

Dengan efek yang sangat massif tersebut, sudah saatnya negara-negara ASEAN menjalin komunikasi dan koordinasi secara mantap untuk upaya kerjasama dalam pengawasan dan pemeliharaan hutan yang berkelanjutan, untuk kepentingan umat manusia dan makhluk di bumi ini. karena tugas manusia yang hakiki di muka bumi adalah sebagai khalifah bagi manusia dan makhluk yang hidup di muka bumi.

REFRENSI

Bagus, Muhamad, 2013. "Menjaga hubungan baik antar Negara tetangga (Indonesia-Malaysia)". Makalah Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Bungin, Burhan. 2018. *Komunikasi Politik Pencitraan The Social Construction of Public Administration (SCoPA). Kontruksi Sosial Atas Citra Pemimpin Publik dan Kebijakan-Kebijakan Negara dalam Perspektif Postmodern Public Communication and new Public Administration.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Dharmaputra, Rizal. 2009. *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan.* Jakarta: IDSPS Press

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2011. *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional.* Jakarta: Graha Ilmu

Harbani, Pasolong. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi.* Bandung: CV. Alfabeta

Hasan, Erliana, 2010. *Komunikasi Pemerintahan.* Bandung: PT Rafika Aditama.

Hasan, Erliana, 2014. *Materi Pokok Komunikasi Pemerintahan.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia

Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis.* Jakarta: PPM

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik.* Bandung. Alfabeta

Teuku Rezasyah. 2011. *17 Bom Waktu Hubungan Indonesia-Malaysia,* Bandung: Humaniora.

Internet

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/040901/sorotan/1242604.htm-paragraph..> Diakses tanggal 13 Maret 2018 Pkl 14.13

<http://209.85.175.104/search/q=cachesGE.permasalahan+hubungan+Indonesia+vs+Malaysia+ppt+asap+akibat+kebakaran+hutan+Indonesia+Malaysia=hubungan>. Diakses tanggal 13 Maret 2018 pkl 14.50.

<http://209.85.175.104/search?q=cacheekkkdqssi+dampak+strategis+sector+pemerintah+akibat+asap+kebakaran+hutan&hl>. Diakses tanggal 13 Maret 2018 pkl. 16.00

....*Milenium Development Goals* 2008. 2008, United State United Nation, hal 38. Diakses tanggal 13 Maret 2018 pkl. 16.25.

Pemerintah disinyalir manipulasi luas hutan yang terbakar “Suara Pembaharuan, 10 Agustus 1999 dari buku *trial by fire* ... Diakses tanggal 14 Maret 2018 pkl. 18.00.

<http://kompas.com>Kabut Asap Tunda Jadwal Penerbangan, Kompas tanggal 8 Agustus 2008. Hlm 23.

<http://209.85.175.104/search.multiply.com/journal/item/20+pengaruh+sosial+budaya+akibat+asap+kebakaran+hutan&hl>. Diakses tanggal 14 Maret 2018, pkl 16.40.

<http://Harian.TheStar.Com>. Diakses tanggal 14 pkl 18.10

<http://indonesiancommunity.multiply.com/notes/item/323>. Diakses tanggal 14 pkl 18.20

<http://www.detiknews.com/read/2008/13/17120/988073/10/minim-dana-polda-metrojaya-tebang-pilih-kasus>. Diakese tanggal 15 Maret 2018 pkl.12.02.

<http://209.85.175.104/searchlq=cecheekkkdssi+dampak+strategis+sektor+pemerintah+akibat+asap+kebakaran+hutan&hl=id>. Diakses tanggal 15 Maret 2018, pkl.14.00

<http://indonesiancommunity.multiply.com/notes/team/323>. Diakses tanggal 15 Maret 2018, pkl 14.50

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara